

## **BPK BERKONTRIBUSI BESAR BANGUN NTB**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Geliat pembangunan NTB pasca gempa 2018 dan pandemi Covid-19 tak lepas dari kontribusi besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. “Begitu pula dengan kabupaten/kota yang terus bangkit dan berlari mengatasi keadaan sulit,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam acara serah terima jabatan kepala perwakilan BPK NTB yang baru di Hotel Aruna Senggigi, Lobar, Senin (11/10/2021).

Wagub menuturkan, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut merupakan pembuktian bahwa pembangunan NTB berada dalam situasi yang baik. Wagub juga menyebut penanganan pandemi makin baik sehingga NTB telah berada di level 1. Karena itu wagub juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPK perwakilan NTB atas sinergi dan kolaborasi selama ini. Ketua IV BPK RI Harry Aziz Azhar mengatakan, dalam pengelolaan APBN/APBD ada empat indikator utama dalam penggunaan anggaran sesuai amanat undang-undang dasar. Yakni angka kemiskinan, pengangguran, indeks gini rasio, dan indeks pembangunan manusia. “Keempat hal ini menjadi capaian maksimal dari pengelolaan anggaran selain capaian minimal laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian,” ujar Harry. ebagai informasi, dalam

serah terima kepala BPK perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana yang dimutasi ke Kalimantan Tengah diganti Heri Purwanto yang pernah menjabat kepala BPK perwakilan Maluku. (ewi/r1).

#### Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/11/10/2021/bpk-berkontribusi-besar-bangun-ntb/>, Diakses 17 Oktober 2021
2. <https://www.selaparangnews.com/2021/10/ummi-rohmi-bpk-berkontribusi-besar.html/11/10/2021>, Diakses 17 Oktober 2021

#### Catatan:

- **Badan Pemeriksa Keuangan Adalah** Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>
- **BPK merupakan satu lembaga negara** yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>2</sup>
- **BPK Berkedudukan di BPK berkedudukan** di Ibukota negara. BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.<sup>3</sup>
- **BPK bertugas** memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.<sup>4</sup>
- **Pemeriksaan BPK** mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>5</sup> Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*